Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Zulhamsyah Putra^{1*}
Liza Aisyah Nazrita²
Happy Ertlys Gita Lestari³
Endri⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: zulhamsyah031288@gmail.com, liza.aisyah68@gmail.com, gitalstr36@gmail.com,
endriessaemha@gmail.com

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang semakin dikenal dalam sistem hukum modern, termasuk di lingkungan kepolisian. Studi ini mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam penerapan sistem keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ada, serta data dari wawancara dengan penyidik Polri, penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu krusial yang mempengaruhi implementasi keadilan restoratif. Peluangnya termasuk upaya untuk meningkatkan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, sementara tantangannya meliputi kurangnya pemahaman yang cukup tentang konsep tersebut di kalangan penyidik serta kurangnya sosialisasi terkait regulasi terbaru. Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan pelatihan yang lebih efektif bagi anggota Polri dalam menerapkan keadilan restoratif secara optimal.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstract

Restorative justice is an approach that is increasingly recognized in the modern legal system, including in the police environment. This study explores the opportunities and challenges in implementing the restorative justice system in the Indonesian National Police (Polri). By using qualitative analysis of various existing regulations and policies, as well as data from interviews with National Police investigators, this research identified several crucial issues that influence the implementation of restorative justice. Opportunities include efforts to increase reconciliation between perpetrators, victims and society, while challenges include a lack of sufficient understanding of the concept among investigators as well as a lack of outreach regarding the latest regulations. It is hoped that the results of this study can contribute to the development of more effective policies and training for members of the Indonesian National Police in implementing restorative justice optimally.

Keywords: Restorative Justice, Republic of Indonesia State Police

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengalami perubahan serta perkembangan. Salah satu perkembangan yang terjadi terlihat pada prinsip hukum pidana klasik yang sifatnya retributif atau pembalasan beralih menjadi keadilan restoratif yang fokus utamanya pemulihan hubungan dan keadaan seperti semula antara korban dan pelaku. Sehingga penempatan hukuman pidana badan terkhusus penjara bukan lagi menjadi yang utama melainkan menjadi pilihan terakhir ketika sanksi-sanksi lain tidak dapat memberikan efek jera. Penempatan pidana badan sebagai *ultimum remedium* inilah yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai salah satu kebijakan yang solutif untuk menangani *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.¹

Restorative Justice dicetuskan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 dalam bukunya yang berjudul "*Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*". Keadilan restoratif

¹ Asmin Fransiska, *Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective* (Mauritius: LAP Lambert Publishing Academy, 2016) Hal 30.

adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak. Dalam dunia internasional, konsep ini pertama kali mendapatkan perhatian luas melalui beberapa dokumen penting dan inisiatif. *The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century* Pada tahun 2000, Deklarasi Wina ini adalah dokumen penting yang diadopsi pada Kongres PBB ke-10 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan yang berlangsung di Wina. Dokumen ini menyoroti pentingnya keadilan restoratif sebagai cara untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, dan menyerukan integrasi prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana di seluruh dunia. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* Pada tahun 2002, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) mengadopsi prinsip-prinsip dasar ini. Dokumen ini memberikan panduan tentang bagaimana program-program keadilan restoratif dapat diimplementasikan dalam konteks peradilan pidana. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya kesukarelaan partisipasi, perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, dan penggunaan prosedur yang transparan dan adil. *Handbook on Restorative Justice Programmes (Second Edition)* oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2020, Panduan yang diterbitkan oleh UNODC ini merupakan edisi kedua yang memberikan ² panduan praktis dan komprehensif untuk implementasi program keadilan restoratif.

Dalam perkembangannya Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mulai menerapkan prinsip Keadilan Restoratif, hal ini dapat dilihat di beberapa peraturan yang mengedepankan nilai keadilan restoratif ;

- a. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- c. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- e. Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- f. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
- g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sistem keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan kejahatan yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Konsep ini mulai mendapat perhatian di Indonesia sebagai respons terhadap berbagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap lebih represif dan kurang efektif dalam mengatasi permasalahan sosial yang mendasari tindak kejahatan.

² Dio Ashar Wicaksana, *Restorative Justice: Peluang Diversi Dalam Rancangan KUHP Bagi Pengguna Dan Pecandu Narkotika* (Jakarta Selatan: International Criminal Justice Reform, 2022) Hal 44.

Penerapan sistem keadilan restoratif di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menawarkan berbagai peluang. Pertama, sistem ini dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan menyelesaikan kasus-kasus tertentu di luar pengadilan, sehingga mempercepat proses penyelesaian kasus dan mengurangi jumlah tahanan. Kedua, keadilan restoratif dapat meningkatkan kepuasan korban karena mereka diberi kesempatan untuk menyuarakan pengalaman dan harapan mereka, serta berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik. Ketiga, pendekatan ini dapat memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat, karena menunjukkan bahwa polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam memulihkan harmoni sosial.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan deduktif, yang menganalisis norma, asas, dan prinsip hukum secara sistematis dari umum ke khusus. Penelitian ini memberikan penjelasan, deskripsi, dan gambaran tentang hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.³

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan terkait Keadilan Restoratif seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber seperti buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan wawancara yang berkaitan dengan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian ini.⁴

Metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Proses pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet atau website.

Dalam menganalisis data, digunakan metode kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap berbagai sumber hukum yang ada. Analisis difokuskan pada identifikasi kekosongan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011) Hal 11.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram University Pers*, Cetakan I (Mataram: Mataram University Press, 2020) Hal 31.

norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur, khususnya terkait dengan bahan hukum primer.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peluang Penerapan Sistem Keadilan Restoratif di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Istilah "Restorative Justice" digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan berbagai program yang memandang kejahatan dan memberikan respons dengan pendekatan restoratif. Fokus dari restorative justice adalah memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, melibatkan korban, mengakui tanggung jawab pelaku, dan mencegah terjadinya kerugian serupa di masa depan. Menurut John Braithwaite, tujuan utama dari restorative justice adalah untuk menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh tindakan pelaku dan mencapai konsiliasi serta rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.⁶ Berdasarkan Keadilan Restoratif, menurut Teori Kebijakan Kriminal G. Peter Hoefnagles, kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani kejahatan. Salah satu pendekatan dalam kebijakan kriminal adalah menjadikan perilaku manusia sebagai target untuk perubahan, dengan tujuan mengarahkan mereka untuk berperilaku lebih baik.⁷ Metode ini akan menghasilkan rasa malu dan tanggung jawab pribadi serta tanggung jawab keluarga atas kesalahan mereka, yang kemudian diperbaiki dengan cara yang memadai.⁸

Dasar hukum kepolisian dalam melakukan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan mampu memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kasus hukum. Namun, dalam penerapan keadilan restoratif ini, penulis menemukan beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh penegak hukum, khususnya penyidik Polri, yang perlu segera dicari solusinya. Salah satu permasalahan tersebut adalah dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, yang sebenarnya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun, kurangnya pengetahuan penyidik mengenai konsep keadilan restoratif menjadi hambatan dalam penerapannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, karena belum semua penyidik mengikuti sosialisasi tersebut. Akibatnya, penyidik menganggap bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif hanya sebagai upaya perdamaian biasa, padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi.⁹

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I (Bandung: Alfabeta, 2017) Hal 20.

⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice. The Handbook of Crime and Punishment* (Oxford University Press, 1998) Hal 14.

⁷ Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh* (Jakarta: Prenadamedia, 2013) Hal 81.

⁸ Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 2, no. 1 (2015), Hal 109.

⁹ "Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" (n.d.).

khusus. Persyaratan materil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain ¹⁰:

1. Tidak menyebabkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak menimbulkan konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah persatuan bangsa;
4. Tidak bersifat radikal atau separatis;
5. Bukan pelaku yang mengulangi tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
6. Bukan pelaku tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang mengancam nyawa orang lain.

Menurut pasal 3 keadilan restoratif berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan pada kegiatan Penyelenggaraan, Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. Pelaksanaan penyidikan kepolisian harus disesuaikan dengan kewajiban umum polisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan kepolisian adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang tertib, penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). ¹¹

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi harus selalu menghormati hukum dan HAM. Pelaksanaan fungsi kepolisian adalah sebuah profesi, yang berarti dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri menggunakan keahlian profesionalnya, terutama di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu, setiap anggota kepolisian harus mematuhi kode etik profesi Polri, yang mencakup norma perilaku dan moral sebagai pedoman dan dorongan semangat, serta rambu nurani bagi setiap anggota untuk memastikan bahwa profesi kepolisian dijalankan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, polisi harus benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang bersih. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup:

1. Etika pengabdian, yaitu komitmen moral anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan, yaitu komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya sebagai wadah pengabdian yang harus dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
3. Etika kenegaraan, yaitu komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk selalu bersikap netral, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau golongan, dalam rangka menjaga tegaknya hukum di Republik Indonesia.

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Restorative Justice saat ini di Indonesia masih dimaknai sebagai alat untuk penghentian perkara. Pelaksanaan restorative justice oleh institusi kepolisian dilakukan melalui dua fungsi kepolisian di lapangan, yaitu reserse (penyidik) dan pelayanan masyarakat (Binmas). Namun, meskipun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah memiliki berbagai peraturan internal terkait restorative justice, masih belum ada modul pelatihan atau standar kompetensi khusus yang disusun bagi anggota kepolisian yang bertugas melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Padahal, ada aspek penting yang diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

“(bahwa) Penerapan prinsip keadilan restoratif ini tidak dimaknai hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi dapat dimaknai secara lebih luas sebagai pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat (korban, pelaku dan masyarakat setempat) dengan menempatkan penyelidik/penyidik sebagai mediator, dimana salah satu bentuk penyelesaian perkaranya adalah perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban dengan memintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum”¹²

Prinsip ini penting dan mencerminkan nilai dasar restorative justice yang tidak tercantum dalam aturan internal institusi lain, sehingga harus dianggap sebagai langkah progresif. Prinsip ini perlu diinternalisasi oleh penyidik yang melakukan upaya-upaya restoratif, yang dapat dicapai melalui modul dan pelatihan. Namun, ketiadaan modul pelatihan dan standar kompetensi ini. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan peraturan terkait restorative justice di lapangan. Ketika dikombinasikan dengan substansi peraturan yang belum sempurna (misalnya, restorative justice dapat menghentikan penyelidikan), banyak anggota kepolisian yang membuat penafsiran sendiri-sendiri mengenai substansi peraturan tersebut.¹³

Idealnya, dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar hukum, yang sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, diharapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

Namun, dalam penerapan keadilan restoratif, penulis menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh penegak hukum, khususnya penyidik Polri, yang perlu segera diselesaikan. Salah satu masalah tersebut adalah kurangnya pengetahuan penyidik mengenai konsep keadilan restoratif, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Belum semua penyidik mengikuti sosialisasi terkait keadilan restoratif, sehingga mereka beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif hanya merupakan upaya perdamaian biasa. Padahal, ada syarat-syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi dalam penerapannya.

Selain itu, kultur kerja penyidik yang sebagian besar masih kolot dan menjalankan tugas-tugasnya dengan pola pikir legistik dan paradigma positivistik menimbulkan keraguan dalam diri penyidik saat melaksanakan tugas, terutama dalam melakukan penghentian penyidikan. Mereka

¹² “Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (n.d.).

¹³ Iqbal Felisiano and Amira Paripurna, “Penerapan Keadilan Restoratif Dan Celah Praktik Korupsi,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2023), Hal 145.

takut jika melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif, maka akan dianggap melanggar aturan (KUHAP) dan mendapatkan teguran dari atasan.

Pihak yang berperkara merasa sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara. Setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, mereka harus kembali datang untuk melakukan klarifikasi yang juga dituangkan dalam berita acara. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Polri tetap menjalankan pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan *restorative justice*. Pengawasan ini dilakukan oleh organ pengawas penyidikan yang berada di tingkat Polres hingga ke Mabes Polri serta oleh organ Propam Polri. Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* juga dicatat dalam satu register dengan format tertentu.

Ke depan, Polri berencana untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan *restorative justice* yang sudah diatur melalui suatu peraturan kepolisian, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Dengan adanya peraturan kepolisian ini, anggota kepolisian akan menerima sosialisasi dan pelatihan terkait *restorative justice*. Pelatihan tersebut direncanakan akan dilaksanakan melalui Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

KESIMPULAN

Keadilan Restoratif, menurut Teori Kebijakan Kriminal G. Peter Hoefnagles, adalah upaya rasional dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani kejahatan dengan mengubah perilaku manusia menuju perilaku yang lebih baik. Metode ini bertujuan untuk membangkitkan rasa malu dan tanggung jawab pribadi serta keluarga atas kesalahan yang dilakukan, yang kemudian diperbaiki dengan cara yang memadai.

Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini bertujuan memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam kasus hukum.

Namun, dalam praktiknya, penulis menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penegak hukum, terutama penyidik Polri. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman mereka tentang konsep keadilan restoratif, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Beberapa penyidik menganggap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif hanya sebagai upaya perdamaian biasa, padahal terdapat syarat-syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi.

Tantangan lainnya termasuk kultur kerja yang masih terpaku pada pola pikir legistik dan paradigma positivistik, yang menyebabkan keraguan dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghentikan penyidikan. Pihak yang berperkara juga merasa terbebani dengan pemeriksaan tambahan setelah perdamaian dilakukan di hadapan penyidik, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam proses gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik.

Meskipun demikian, Polri tetap melakukan pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan *restorative justice* melalui organ pengawas penyidikan di tingkat Polres hingga Mabes Polri serta Propam Polri. Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* juga dicatat dalam register khusus. Sehingga kedepannya Polri harus dapat menyempurnakan mekanisme penerapan keadilan restoratif yang berfokus kepada prinsip dan asasnya. Secara penerapan maka perlu adanya pendidikan khusus kepada penyelidik dan penyidik Polri dalam penerapan keadilan restoratif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, John. *Restorative Justice. The Handbook of Crime and Punishment*. Oxford University Press, 1998.
- Felisiano, Iqbal, and Amira Paripurna. "Penerapan Keadilan Restoratif Dan Celah Praktik Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2023).
- Fransiska, Asmin. *Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective*. Mauritius: LAP Lambert Publishing Academy, 2016.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Mataram University Pers*. Cetakan I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (n.d.).
- Rochaeti, Nur. "Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 2, no. 1 (2015).
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (n.d.).
- Wicaksana, Dio Ashar. *Restorative Justice: Peluang Diversi Dalam Rancangan KUHAP Bagi Pengguna Dan Pecandu Narkotika*. Jakarta Selatan: International Criminal Justice Reform, 2022.